



Research Article

## Literasi Digital dan Kewarganegaraan Aktif: Menguatkan Demokrasi Partisipatif di Media Sosial

Muhammad Rahman Syah Putra<sup>1</sup>, Aldi Maulana<sup>2</sup>, Hafizorrahman<sup>3</sup>,  
Marshanda Putri<sup>4</sup>

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia;

[Putrapku65@gmail.com](mailto:Putrapku65@gmail.com) 

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia;

[amo421881@gmail.com](mailto:amo421881@gmail.com)

3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia;

[ysshafizor@gmail.com](mailto:ysshafizor@gmail.com)

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia;

[marshandaputrinww@gmail.com](mailto:marshandaputrinww@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 11, 2024

Revised : September 29, 2025

Accepted : October 17, 2025

Available online : November 16, 2025

**How to Cite:** Muhammad Rahman Syah Putra, Aldi Maulana, Hafizorrahman, & Marshanda Putri. (2025). Digital Literacy and Active Citizenship: Strengthening Participatory Democracy on Social Media. *Public Policy: Jurnal Ilmu Sosial Dan Kebijakan*, 2(2), 156–170. <https://doi.org/10.61166/policy.v2i2.29>

### Digital Literacy and Active Citizenship: Strengthening Participatory Democracy on Social Media

**Abstract.** The rapid development of digital technology, particularly social media, has transformed the landscape of communication and public participation in Indonesia. Social media has now become a primary platform for the dissemination of information, political discussion, and expression—especially

among the younger generation. However, behind its positive potential as a tool for digital democracy, there are serious challenges such as the spread of hoaxes, hate speech, and opinion polarization due to low levels of digital literacy. This study aims to analyze the role of digital literacy in promoting active citizenship and strengthening participatory democracy on virtual social platforms. Using a qualitative literature study method, this research examines how improving digital literacy can equip society—particularly first-time voters—to identify false information, engage constructively in political discourse, and take an active role in preventing the spread of disinformation. The findings show that adequate digital literacy is key to creating a healthy democratic space, where citizens can interact critically, responsibly, and inclusively, thereby supporting the realization of a welfare state and national resilience.

**Keywords:** Digital Literacy, Active Citizenship, Participatory Democracy, Social Media.

**Abstrak.** Pesatnya perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah lanskap komunikasi dan partisipasi publik di Indonesia. Media sosial kini menjadi platform utama bagi penyebaran informasi, diskusi, dan ekspresi politik, terutama di kalangan generasi muda. Namun, di balik potensi positifnya sebagai sarana demokrasi digital, terdapat tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini akibat rendahnya literasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi digital dalam mendorong kewarganegaraan aktif dan memperkuat demokrasi partisipatif di platform sosial virtual. Dengan menggunakan metode studi literatur kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana peningkatan literasi digital dapat membekali masyarakat, khususnya pemilih pemula, untuk mengidentifikasi informasi yang tidak benar, berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi politik, dan mengambil peran aktif dalam mencegah penyebaran disinformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang memadai adalah kunci untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat, di mana warga negara dapat berinteraksi secara kritis, bertanggung jawab, dan inklusif, sehingga mendukung terwujudnya welfare state dan ketahanan nasional.

**Kata Kunci:** Literasi Digital, Kewarganegaraan Aktif, Demokrasi Partisipatif, Media Sosial.

## PENDAHULUAN

### Transformasi Sosial dan Politik di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan mendasar dalam lanskap sosial dan politik Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, tetapi juga mendefinisikan ulang struktur kekuasaan, distribusi informasi, dan mekanisme partisipasi publik. Media sosial, dengan karakteristiknya yang interaktif, real-time, dan berbasis jaringan, telah menggantikan dominasi media massa konvensional sebagai sumber utama berita dan informasi (Asriadi and Hasyim 2024). Platform seperti Twitter, Instagram, dan TikTok kini menjadi arena utama bagi wacana publik, kampanye politik, dan mobilisasi sosial.

Konsekuensi dari pergeseran ini adalah lahirnya apa yang disebut sebagai *masyarakat digital* (Fatimah 2025), yaitu komunitas yang aktivitas sosial, ekonomi, dan politiknya berlangsung secara intensif di ruang virtual. Dalam masyarakat digital, identitas individu dan kolektif dibentuk melalui interaksi daring, sementara opini publik dibentuk oleh algoritma dan viralitas konten, bukan semata oleh otoritas editorial media.

Perubahan ini turut memengaruhi praktik demokrasi. Konsep *demokrasi digital* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan partisipasi politik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif. Demokrasi digital merujuk pada penggunaan TIK

untuk memperluas akses terhadap proses politik, mulai dari penyebaran informasi kebijakan hingga pelibatan warga dalam pengambilan keputusan (Hacker & Van Dijk, dalam (Putra et al. 2024)). Di Indonesia, praktik ini terlihat dalam berbagai bentuk: e-voting dalam pemilihan internal partai, petisi daring, diskusi publik melalui live streaming, hingga kampanye politik berbasis algoritma. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan serius. Polarisasi opini, penyebaran disinformasi, dan manipulasi algoritmik menjadi ancaman bagi kualitas deliberasi publik. Demokrasi digital, meskipun menjanjikan partisipasi yang lebih luas, tetap membutuhkan regulasi yang adaptif, literasi digital yang kuat, dan etika komunikasi yang terjaga agar tidak terjebak dalam ilusi partisipatif yang dangkal.

### Media Sosial sebagai Katalis Demokrasi Partisipatif

Potensi media sosial dalam memperkuat demokrasi partisipatif sangat signifikan. Platform digital seperti Facebook, X (sebelumnya Twitter), Instagram, dan TikTok telah menjadi ruang publik baru yang memungkinkan individu untuk merepresentasikan diri, menyuarakan pendapat, berinteraksi lintas kelompok, serta membentuk komunitas berbasis kepentingan dan nilai bersama (Asriadi and Hasyim 2024). Dalam konteks demokrasi, media sosial berfungsi sebagai medium yang mendekatkan warga negara dengan proses politik, membuka akses terhadap informasi kebijakan, dan menyediakan kanal untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemangku kepentingan.

Karakteristik media sosial yang bersifat partisipatif dan desentralistik memungkinkan terjadinya *bottom-up engagement*, di mana inisiatif politik dan sosial dapat muncul dari akar rumput, bukan hanya dari elite atau institusi formal. Fenomena seperti gerakan #ReformasiDikorupsi, kampanye lingkungan hidup, atau advokasi hak perempuan di Indonesia menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat mobilisasi yang efektif, memperluas jangkauan isu-isu kritis, dan mendorong solidaritas lintas wilayah serta kelas sosial.

Lebih jauh, media sosial juga mendukung prinsip deliberatif dalam demokrasi partisipatif. Diskusi terbuka, debat publik, dan pertukaran gagasan dapat berlangsung secara real-time, melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang yang beragam. Hal ini menciptakan peluang untuk membangun konsensus, meningkatkan literasi politik, dan memperkuat kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

Namun, potensi ini tidak lepas dari tantangan. Dinamika algoritma yang memprioritaskan konten sensasional, risiko echo chamber dan polarisasi, serta penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dapat merusak kualitas partisipasi dan menghambat proses deliberatif yang sehat. Oleh karena itu, penguatan demokrasi partisipatif melalui media sosial harus disertai dengan:

- Peningkatan literasi digital  
Agar pengguna mampu memilah informasi, memahami konteks, dan berpartisipasi secara kritis.
- Regulasi platform yang adil dan transparan  
Untuk mencegah manipulasi algoritmik dan melindungi hak kebebasan berekspresi.

- Penguatan etika komunikasi dan budaya dialog

Guna menciptakan ruang publik yang inklusif dan konstruktif.

Dengan pendekatan yang tepat, media sosial bukan hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga instrumen demokratisasi yang mampu memperkuat keterlibatan warga dalam kehidupan politik secara bermakna.

Kepada pemerintah melalui media sosial menandai pergeseran penting dalam hubungan antara negara dan warga negara. Platform digital memungkinkan komunikasi dua arah yang sebelumnya sulit diwujudkan dalam sistem birokrasi konvensional. Kini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik (Putra et al. 2024).

Fenomena ini sejalan dengan prinsip *demokrasi deliberatif*, sebagaimana dikemukakan oleh Gutmann dan Thompson dalam (Putra et al. 2024), yang menekankan pentingnya dialog rasional, inklusif, dan reflektif dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme elektoral, tetapi sebagai proses berkelanjutan di mana warga negara terlibat dalam diskusi publik, mengajukan argumen, dan menilai kebijakan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

### **Ancaman terhadap Integritas Demokrasi Digital: Literasi Rendah dan Disinformasi**

Di balik peluang besar yang ditawarkan oleh demokrasi digital, terdapat tantangan serius yang berpotensi menggerus integritas dan kualitas partisipasi publik. Perkembangan pesat dunia digital tidak hanya membuka ruang ekspresi dan interaksi, tetapi juga menghadirkan risiko sistemik seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian (*hate speech*), pemutarbalikan fakta, provokasi, serta isu-isu sensitif terkait SARA dan terorisme (Asriadi and Hasyim 2024). Fenomena ini tidak hanya mengganggu ketertiban sosial, tetapi juga menciptakan distorsi dalam proses deliberatif yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi digital.

Indonesia, meskipun memiliki jumlah pengguna internet yang besar dan penetrasi media sosial yang luas, masih menghadapi tantangan mendasar berupa rendahnya literasi digital masyarakat. Studi oleh Kurniawati dalam (Asriadi and Hasyim 2024)) dan (Lazuardy, Sukmana, and Japar 2025) menunjukkan bahwa banyak pengguna belum memiliki kemampuan kritis untuk memilah informasi, memahami konteks digital, dan mengidentifikasi konten manipulatif. Data survei Kominfo tahun 2021 memperkuat temuan ini, dengan indeks literasi digital Indonesia berada pada kategori sedang, dan *Digital Safety* tercatat sebagai pilar terlemah (Asriadi and Hasyim 2024). Artinya, aspek keamanan digital—termasuk perlindungan data pribadi, pengenalan ancaman siber, dan kemampuan menghindari konten berbahaya—masih belum menjadi perhatian utama masyarakat.

Rendahnya literasi digital di Indonesia menjadi tantangan serius dalam menjaga kualitas demokrasi digital. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat dalam memilah informasi, memahami konteks, dan mengenali konten manipulatif menjadikan mereka rentan terhadap disinformasi dan propaganda digital. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kebingungan informasi (*information disorder*), tetapi juga memperdalam polarisasi politik dan memperlemah kepercayaan

terhadap institusi demokrasi (Setiawan, Syobar, dan Puspita 2025). Ketika opini publik dibentuk oleh narasi yang tidak diverifikasi dan konten provokatif, ruang deliberatif yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi partisipatif berubah menjadi arena konflik dan fragmentasi sosial.

Dalam konteks ini, penguatan literasi digital menjadi krusial untuk mendorong terbentuknya kewarganegaraan aktif yang bertanggung jawab di ruang virtual. Literasi digital tidak hanya merujuk pada kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga mencakup kapasitas kognitif dan afektif dalam menganalisis, mengevaluasi, serta memproduksi informasi secara kritis dan etis (Setiawan, Syobar, dan Puspita 2025). Individu yang memiliki literasi digital tinggi mampu memahami dinamika algoritma, mengenali bias informasi, serta menghindari jebakan konten yang bersifat manipulatif atau provokatif.

Kewarganegaraan aktif di era digital menuntut partisipasi yang tidak hanya masif, tetapi juga reflektif dan konstruktif. Literasi digital menjadi fondasi bagi individu untuk terlibat secara cerdas dalam diskusi publik, menyampaikan aspirasi secara argumentatif, serta mengawal kebijakan dengan pendekatan berbasis data dan logika. Dalam demokrasi partisipatif, warga negara yang melek digital memiliki peran strategis sebagai penjaga integritas informasi dan penggerak dialog publik yang sehat.

Selain mendorong partisipasi yang bermakna, literasi digital juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap ancaman disinformasi dan ujaran kebencian. Individu yang memiliki kemampuan kritis dalam membaca dan menafsirkan informasi digital cenderung lebih tahan terhadap manipulasi opini dan tidak mudah terprovokasi oleh konten yang bersifat ekstrem atau memecah belah. Dalam konteks Indonesia, di mana isu SARA dan politik identitas sering dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral, literasi digital menjadi alat penting untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas demokrasi.

Dengan demikian, literasi digital bukan hanya kebutuhan teknologis, tetapi juga kebutuhan demokratis. Upaya peningkatan literasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan demokrasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan platform digital perlu berkolaborasi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, mendorong budaya dialog yang konstruktif, serta memperkuat kapasitas masyarakat sebagai warga digital yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menggali secara mendalam peran literasi digital dalam mendorong kewarganegaraan aktif dan memperkuat demokrasi partisipatif di platform sosial virtual. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi konseptual dan analisis kritis terhadap berbagai sumber pengetahuan yang telah tersedia, serta mengidentifikasi pola-pola pemikiran yang relevan dengan isu yang dikaji. Studi literatur juga memberikan ruang untuk membandingkan berbagai perspektif teoritis dan empiris yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku akademik, laporan survei nasional, dan artikel berita dari media kredibel. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang telah dirumuskan secara tematik, antara lain: “literasi digital”, “demokrasi digital”, “partisipasi politik”, “kewarganegaraan aktif”, “media sosial”, “hoaks”, “hate speech”, “negative campaign”, “pemilih pemula”, dan “Indonesia”. Sumber- sumber yang dipilih merupakan publikasi yang terbit dalam kurun waktu lima tahun terakhir, guna memastikan relevansi dan aktualitas data yang digunakan.

### **Teknik Analisis Data**

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan tematik. Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu penyaringan informasi untuk mengidentifikasi konten yang paling relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi analitis dan tabel tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, kategori, dan hubungan antar konsep. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan data berdasarkan isu utama seperti literasi digital, partisipasi politik, dan ancaman disinformasi, sehingga menghasilkan pemetaan konseptual yang lebih sistematis.

Setelah data disajikan dalam bentuk narasi, tahap selanjutnya adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis secara mendalam hubungan antar kategori tematik, mengaitkan temuan dengan kerangka teori yang digunakan, serta mengevaluasi relevansi data terhadap pertanyaan penelitian. Interpretasi dilakukan secara reflektif untuk memahami bagaimana literasi digital memengaruhi pola partisipasi politik dan dinamika demokrasi digital, khususnya di kalangan pemilih muda. Temuan yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan wawasan analitis tentang tantangan dan peluang dalam membangun kewarganegaraan aktif di era digital.

Untuk memastikan keabsahan dan konsistensi hasil analisis, dilakukan proses triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber pustaka yang berbeda, termasuk jurnal akademik, laporan survei, dan artikel berita. Triangulasi ini bertujuan untuk menghindari bias interpretasi, memperkuat kredibilitas temuan, dan memastikan bahwa analisis mencerminkan realitas sosial secara akurat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menghasilkan pemetaan konseptual yang sistematis, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami peran literasi digital sebagai fondasi demokrasi partisipatif di Indonesia.

### **Interpretasi dan Validasi Temuan**

Tahapan akhir dalam proses analisis adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, temuan data dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan teori demokrasi deliberatif serta konsep demokrasi digital. Peneliti berupaya memahami bagaimana literasi digital dapat menjadi fondasi bagi kewarganegaraan aktif, khususnya di kalangan pemilih muda yang sangat terpapar

oleh dinamika media sosial. Untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Triangulasi ini bertujuan untuk menghindari bias interpretasi dan memperkuat keandalan hasil penelitian.

Temuan yang diperoleh dari proses interpretasi tidak hanya memperkuat pemahaman tentang literasi digital sebagai elemen kunci dalam demokrasi digital, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep demokrasi deliberatif di era teknologi. Dengan mengaitkan data empiris dengan teori Gutmann dan Thompson tentang partisipasi rasional dan reflektif, penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital berperan sebagai prasyarat deliberasi yang sehat. Literasi digital memungkinkan individu untuk tidak hanya mengakses dan menyebarkan informasi, tetapi juga untuk menilai, mengkritisi, dan membentuk opini publik secara bertanggung jawab. Dalam konteks pemilih muda, literasi digital menjadi instrumen penting untuk membentuk identitas politik yang aktif, kritis, dan inklusif.

Interpretasi hasil penelitian juga mempertimbangkan konteks sosial-politik Indonesia yang tengah mengalami transformasi digital secara masif. Pemilih muda sebagai generasi digital-native menunjukkan pola partisipasi politik yang berbeda dari generasi sebelumnya—lebih spontan, berbasis isu, dan sangat dipengaruhi oleh konten media sosial. Literasi digital dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat navigasi informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan identitas politik dan penguatan kapasitas deliberatif. Dengan memahami dinamika ini, penelitian memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana demokrasi digital dapat berkembang secara substansial jika didukung oleh literasi yang kuat dan partisipasi yang reflektif.

Temuan dari penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan studi lanjutan yang lebih aplikatif, seperti evaluasi efektivitas program literasi digital di kalangan pemilih pemula, analisis algoritma platform dalam membentuk opini politik, atau pengembangan model intervensi pendidikan politik berbasis media sosial. Penelitian juga dapat diperluas dengan pendekatan kuantitatif atau studi lapangan untuk mengukur dampak langsung literasi digital terhadap perilaku politik. Dengan demikian, hasil interpretasi tidak hanya bersifat deskriptif dan teoritis, tetapi juga memberikan landasan bagi inovasi kebijakan dan strategi pendidikan politik yang relevan dengan kebutuhan demokrasi digital Indonesia.

### **Kontribusi Penelitian**

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami dinamika politik digital di Indonesia, khususnya di kalangan pemilih muda. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pendidikan politik yang lebih efektif dan kontekstual di era media sosial. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif tentang literasi digital dan partisipasi politik, penelitian ini berupaya mendorong terciptanya ekosistem demokrasi digital yang inklusif, reflektif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperkaya kajian tentang demokrasi digital dan literasi politik di Indonesia.

Dengan menggabungkan pendekatan deskriptif analitis dan tematik, serta mengaitkan temuan dengan teori demokrasi deliberatif, studi ini menawarkan perspektif baru tentang bagaimana teknologi digital membentuk pola partisipasi politik generasi muda. Selain itu, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran literasi digital sebagai instrumen pembentukan kewarganegaraan aktif, yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi etis dan reflektif dalam interaksi sosial-politik di ruang virtual.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi pendidikan politik di era media sosial perlu dirancang secara lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan karakteristik generasi muda dan dinamika platform digital. Pemerintah dapat mengembangkan program literasi digital yang terintegrasi dalam pendidikan formal dan informal, serta mendorong regulasi yang mendukung transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, dan pengawasan konten digital. Kebijakan yang adaptif dan partisipatif akan memperkuat ekosistem demokrasi digital yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan demokrasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, media, platform digital, dan masyarakat sipil. Masing-masing aktor memiliki peran strategis dalam membentuk budaya politik yang sehat dan deliberatif. Pemerintah sebagai fasilitator kebijakan, institusi pendidikan sebagai pengembang kapasitas kritis, media sebagai penyedia informasi yang akurat, dan masyarakat sipil sebagai penggerak partisipasi publik. Sinergi antaraktor ini akan menciptakan ruang digital yang tidak hanya aman dan informatif, tetapi juga mendorong keterlibatan politik yang bermakna dan transformatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Media Sosial sebagai Ruang Demokrasi Digital**

Media sosial telah menjadi arena utama bagi ekspresi dan penyampaian aspirasi masyarakat di Indonesia, terutama sejak pandemi COVID-19 membatasi mobilisasi fisik (Putra et al. 2024). Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter/X, dan YouTube kini berfungsi sebagai kanal informasi politik utama bagi mahasiswa dan pemilih pemula, menyajikan konten yang visual, ringkas, dan mudah diakses (Jam'ul Ihsan Bambang et al. 2025). Ini menunjukkan pergeseran preferensi belajar dari metode konvensional ke pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman (Hudiarini, Lova, dan Kartiko 2024).

Demokrasi digital, sebagai praktik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan partisipasi politik (Sihombing, Gultom, dan Rumapea 2021), memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi tanpa batasan waktu dan ruang (Syahnaz 2021)). Ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif, di mana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawal kebijakan dan pengambilan keputusan (Putra et al. 2024). Pemerintah dan tokoh publik juga memanfaatkan media sosial untuk komunikasi politik dan transparansi kebijakan, seperti yang dicontohkan oleh Ganjar Pranowo dan Kementerian Keuangan ((Putra et al. 2024).

Perubahan ini menunjukkan pergeseran pola belajar dan partisipasi politik dari metode konvensional—seperti seminar, diskusi tatap muka, dan kampanye fisik—ke pendekatan yang lebih berbasis pengalaman digital. Mahasiswa dan pemilih pemula kini lebih tertarik pada konten yang menggabungkan narasi personal, visualisasi data, dan interaksi langsung, seperti video pendek, podcast politik, dan siaran langsung diskusi kebijakan (Widiatmaka and Kurniawan 2023). Hal ini membuka peluang besar bagi pendidikan politik yang lebih inklusif dan kontekstual, namun juga menuntut strategi komunikasi yang adaptif dan berbasis literasi digital.

Transformasi media sosial menjadi kanal utama komunikasi politik telah mengubah cara aktor politik berinteraksi dengan publik. Tokoh publik, partai politik, dan lembaga pemerintahan kini memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan pesan politik secara langsung, membangun citra, dan merespons isu-isu aktual secara real-time. Komunikasi politik yang sebelumnya bersifat satu arah melalui media massa kini menjadi dialog dua arah yang lebih terbuka dan partisipatif. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kedekatan antara pemimpin dan masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas publik melalui transparansi dan keterlibatan langsung. Namun, efektivitas komunikasi ini sangat bergantung pada kualitas konten dan kemampuan masyarakat dalam menafsirkan pesan politik secara kritis.

Di balik peluang tersebut, terdapat tantangan serius yang perlu diantisipasi, terutama terkait rendahnya literasi digital di kalangan pengguna media sosial. Banyak pemilih muda yang belum memiliki kemampuan untuk memilah informasi, mengenali bias, dan memahami konteks politik secara mendalam. Akibatnya, mereka rentan terhadap disinformasi, kampanye negatif, dan manipulasi algoritmik yang memperkuat polarisasi opini. Fenomena *echo chamber* dan *filter bubble* membuat pengguna hanya terpapar pada pandangan yang serupa, sehingga menghambat dialog lintas perspektif dan mempersempit wawasan politik. Untuk itu, pendidikan politik digital yang berbasis literasi kritis menjadi sangat penting agar partisipasi politik yang terjadi tidak bersifat impulsif atau emosional, melainkan reflektif dan berbasis data.

Jika dikelola dengan baik, media sosial memiliki potensi besar untuk mentransformasi demokrasi menjadi lebih inklusif dan deliberatif. Partisipasi digital memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam diskusi kebijakan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan tanpa batasan geografis atau struktural. Mahasiswa dan pemilih pemula, sebagai generasi digital-native, memiliki peluang untuk menjadi motor perubahan dalam demokrasi digital melalui kreativitas konten, advokasi isu, dan mobilisasi sosial berbasis komunitas. Dengan dukungan literasi digital yang kuat dan kebijakan publik yang adaptif, media sosial dapat menjadi ruang pembelajaran politik yang dinamis, membentuk warga negara yang kritis, kolaboratif, dan berdaya dalam proses demokrasi.

### **Tantangan Demokrasi Digital: Hoaks dan Ujaran Kebencian**

Meskipun media sosial menawarkan peluang besar bagi partisipasi politik dan ekspresi publik, ia juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kualitas demokrasi digital. Salah satu ancaman utama adalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*), yang semakin marak di ruang digital Indonesia (Asriadi and

Hasyim 2024) didefinisikan sebagai informasi yang sengaja dimanipulasi untuk menyembunyikan fakta sebenarnya, dengan tujuan menciptakan ketidakamanan, kebingungan, dan ketegangan sosial. Ciri-ciri hoaks antara lain adalah penyebab kecemasan, kebencian, permusuhan, ketidakjelasan sumber, serta muatan fanatisme yang bersifat provokatif.

Di sisi lain, ujaran kebencian merupakan ekspresi yang dirancang untuk menyakiti atau mendiskreditkan kelompok tertentu, baik melalui diskriminasi, permusuhan, maupun kekerasan verbal (UNESCO dalam Santoso dalam (Nurdiyanti 2020)). Dalam konteks politik digital, ujaran kebencian sering kali digunakan sebagai alat kampanye negatif yang menargetkan lawan politik atau kelompok minoritas, sehingga memperkuat polarisasi dan menghambat terciptanya ruang deliberatif yang sehat.

Rendahnya literasi digital di Indonesia memperparah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan kritis untuk membedakan informasi yang valid dari yang palsu, serta cenderung mudah terpengaruh oleh narasi populis dan konten manipulatif (Setiawan, Syobar, dan Puspita 2025). Ketidakmampuan ini menjadikan masyarakat sebagai sasaran empuk bagi aktor-aktor politik yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan disinformasi dan membentuk opini publik secara sepihak.

Data dari Kominfo menunjukkan ribuan kasus hoaks terkait COVID-19 yang tersebar luas di media sosial, menciptakan kepanikan dan ketidakpercayaan terhadap institusi kesehatan dan pemerintah (CNN Indonesia, 2021 dalam (Putra et al. 2024)). Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa literasi digital yang memadai, media sosial justru dapat menjadi alat destruktif yang merusak kepercayaan publik dan mengganggu stabilitas sosial-politik.

Selain faktor literasi, dinamika algoritma platform digital juga berkontribusi terhadap fragmentasi informasi dan polarisasi opini. Algoritma media sosial cenderung menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, menciptakan *echo chamber*—ruang informasi tertutup di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang serupa dengan miliknya (Bangun 2020). Akibatnya, dialog yang sehat dan terbuka menjadi terhambat, karena pengguna tidak lagi berinteraksi dengan perspektif yang berbeda atau menantang.

Polarisasi ini diperparah oleh kampanye politik yang memanfaatkan algoritma untuk menyebarkan konten provokatif dan memperkuat identitas kelompok. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempersempit wawasan politik masyarakat, mengurangi kemampuan deliberatif, dan melemahkan fondasi demokrasi partisipatif. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi komunikasi digital yang tidak hanya informatif, tetapi juga inklusif dan reflektif, guna mendorong keterlibatan politik yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi dampak negatif media sosial terhadap demokrasi digital, diperlukan strategi penguatan literasi digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Literasi digital harus mencakup kemampuan berpikir kritis, etika komunikasi, pemahaman terhadap dinamika algoritma, serta kesadaran hukum terkait konten digital. Program pelatihan literasi media sosial bagi pemilih pemula, integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan, dan kampanye publik yang menekankan

pentingnya verifikasi informasi merupakan langkah awal yang strategis. Selain itu, regulasi yang adaptif dan berbasis hak asasi manusia perlu dikembangkan untuk menanggulangi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menciptakan tata kelola informasi yang adil, transparan, dan akuntabel.

Membangun ekosistem demokrasi digital yang sehat tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi multiaktor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas digital. Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung partisipasi digital yang aman dan inklusif. Institusi pendidikan berperan dalam membentuk generasi muda yang kritis dan etis dalam berinteraksi di ruang digital. Media dan platform digital harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan mendorong dialog publik yang konstruktif. Sementara itu, komunitas digital dapat menjadi ruang pembelajaran dan advokasi yang memperkuat nilai-nilai demokrasi. Dengan sinergi antaraktor ini, media sosial dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan politik yang mendorong partisipasi aktif, deliberatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

### **Peran Literasi Digital dalam Menguatkan Kewarganegaraan Aktif**

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang mengancam integritas demokrasi digital, literasi digital menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya kewarganegaraan aktif yang sehat. Literasi digital bukan sekadar kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital, melainkan mencakup kompetensi kognitif, afektif, dan etis dalam berinteraksi di ruang virtual. Individu yang memiliki literasi digital yang baik mampu mengevaluasi informasi secara kritis, berpartisipasi secara konstruktif, memahami aspek hukum, dan mengembangkan strategi untuk menghadapi disinformasi.

Salah satu aspek utama literasi digital adalah kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis. Dalam konteks media sosial yang sangat cepat dan dinamis, kemampuan ini menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan untuk memverifikasi kebenaran informasi, mengenali manipulasi opini, serta membedakan antara fakta dan opini (Setiawan, Syobar, dan Puspita 2025). Tanpa kemampuan ini, pengguna media sosial akan terus menjadi sasaran empuk bagi hoaks dan kampanye negatif yang merusak kualitas diskusi publik (Asriadi dan Hasyim 2024).

Selain kemampuan kritis, literasi digital juga mencakup kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam diskusi politik. Individu yang melek digital dapat menyuarakan pendapat dengan cara yang bertanggung jawab, menghindari penyebaran ujaran kebencian, dan berkontribusi dalam membangun ruang publik yang sehat dan inklusif (Setiawan, Syobar, dan Puspita 2025). Partisipasi yang reflektif dan etis ini merupakan fondasi penting dalam demokrasi deliberatif, di mana dialog dan pertukaran gagasan menjadi mekanisme utama pengambilan keputusan.

Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan juga menjadi bagian integral dari literasi digital. Masyarakat perlu mengetahui implikasi hukum dari

penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), agar dapat melindungi diri dari pelanggaran hukum dan memahami batas-batas kebebasan berekspresi (Asriadi dan Hasyim 2024). Kesadaran hukum ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan individu, tetapi juga sebagai kontrol sosial terhadap penyalahgunaan media digital.

Literasi digital juga membekali individu dengan kemampuan untuk mengembangkan strategi pribadi dalam menghadapi disinformasi, ujaran kebencian, dan kampanye negatif. Strategi ini dapat berupa verifikasi silang informasi, pelaporan konten berbahaya, serta edukasi kepada lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran konten destruktif (Al Mustaqim et al. 2024). Ketika masyarakat memiliki kapasitas untuk bertindak secara proaktif, media sosial dapat berfungsi sebagai ruang mobilisasi politik yang positif dan produktif.

Upaya peningkatan literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Di antaranya adalah pelatihan literasi media sosial bagi pemilih pemula, yang bertujuan membekali generasi muda dengan keterampilan kritis dan etis dalam berinteraksi di ruang digital (Asriadi dan Hasyim 2024). Selain itu, integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan formal menjadi langkah strategis untuk membangun fondasi literasi sejak dini (Lazuardy, Sukmana, and Japar 2025). Kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem literasi digital yang berkelanjutan dan inklusif (Fazira, Budimansyah, dan Mahpudz 2024).

Dengan literasi digital yang kuat, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian politik. Literasi digital memungkinkan partisipasi yang aktif, kritis, dan reflektif, serta mendorong terciptanya ruang publik yang deliberatif dan demokratis. Dalam konteks demokrasi digital, literasi bukan hanya alat proteksi, tetapi juga katalis transformasi sosial-politik yang memungkinkan warga negara untuk menjadi aktor perubahan yang cerdas dan bertanggung jawab (Setiawan, Syobar, dan Puspita 2025).

Penguatan literasi digital bukan hanya respons terhadap tantangan kontemporer, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan demokrasi di era digital. Literasi digital yang terinternalisasi dalam budaya politik masyarakat akan membentuk generasi warga negara yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran politik, etika komunikasi, dan kemampuan deliberatif yang tinggi. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih resilien terhadap ancaman disinformasi, manipulasi politik, dan fragmentasi sosial. Literasi digital yang kuat juga akan mendorong terciptanya partisipasi politik yang lebih substansial, di mana warga negara tidak hanya terlibat secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Melihat kompleksitas tantangan dan potensi yang dimiliki literasi digital, diperlukan kebijakan publik yang terarah dan sistematis untuk mendukung pengembangannya. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan literasi digital sebagai bagian integral dari strategi pembangunan demokrasi dan pendidikan nasional. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan bagi pendidik, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi digital, serta penyelenggaraan kampanye literasi

digital secara masif dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi yang mendukung transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, dan pengawasan konten digital juga harus diperkuat. Dengan dukungan kebijakan yang progresif dan kolaboratif, literasi digital dapat menjadi fondasi kokoh bagi demokrasi digital yang inklusif, deliberatif, dan berkeadilan.

### **Menguatkan Demokrasi Partisipatif dan Welfare State**

Kewarganegaraan aktif yang didukung oleh literasi digital merupakan elemen kunci dalam memperkuat demokrasi partisipatif di era digital. Masyarakat yang melek digital tidak hanya mampu mengakses informasi secara luas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menilai, menyaring, dan merespons informasi secara kritis. Mereka dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah melalui mekanisme *check and balance*, menyampaikan aspirasi yang relevan, serta berkontribusi dalam perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan nyata (Putra et al. 2024). Literasi digital memungkinkan warga negara untuk menjadi aktor aktif dalam proses demokrasi, bukan sekadar penerima kebijakan.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik dan kebijakan juga sejalan dengan prinsip *welfare state*, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya. Dalam kerangka ini, partisipasi publik bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban demokratis yang menjadi fondasi tata kelola yang adil dan berkelanjutan (Fatimah 2025). Literasi digital memperkuat posisi masyarakat sebagai mitra kritis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh.

Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem demokrasi digital yang transparan dan partisipatif. Pemanfaatan platform digital untuk membuka akses terhadap data publik dan kanal komunikasi dua arah menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas kebijakan. Aplikasi seperti JAKI Mobile dan Laporgub! merupakan contoh konkret bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat interaksi antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan warga untuk melaporkan masalah, memberikan masukan, dan memantau tindak lanjut secara real-time (Putra et al. 2024).

Ketika pemerintah bersikap terbuka terhadap partisipasi publik dan menyediakan infrastruktur digital yang inklusif, maka demokrasi digital tidak hanya menjadi ruang ekspresi, tetapi juga arena kolaborasi antara negara dan warga negara. Transparansi data dan partisipasi terbuka menciptakan kepercayaan, memperkuat legitimasi kebijakan, dan mendorong terciptanya tata kelola yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Optimalisasi peran media sosial dalam pengembangan wawasan kebangsaan juga menjadi aspek penting dalam membentuk kewarganegaraan digital yang produktif. Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konten yang menarik, edukatif, dan inspiratif, yang tidak hanya menginformasikan tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan solidaritas sosial. Konten yang kreatif dan relevan dapat mendorong generasi muda untuk berpartisipasi dalam menyebarkan semangat kebangsaan secara digital, memperkuat identitas nasional di tengah arus globalisasi dan fragmentasi informasi

(Purwantoro et al. 2023)

Dengan pendekatan yang tepat, media sosial dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun karakter warga negara yang kritis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Literasi digital yang kuat, didukung oleh kebijakan publik yang progresif dan konten digital yang berkualitas, akan menciptakan ekosistem demokrasi digital yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga berdaya tahan terhadap ancaman disinformasi dan polarisasi.

Untuk menciptakan ekosistem demokrasi digital yang berkelanjutan, diperlukan sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, media, platform digital, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus menyediakan regulasi dan infrastruktur yang mendukung partisipasi digital yang aman dan inklusif. Institusi pendidikan perlu mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum dan membentuk ruang diskusi politik yang terbuka. Media dan platform digital harus bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan mendorong dialog publik yang sehat. Sementara itu, masyarakat sipil dan komunitas digital dapat menjadi penggerak utama dalam membangun budaya politik yang deliberatif dan kolaboratif. Dengan sinergi ini, demokrasi digital dapat berkembang sebagai sistem yang tidak hanya responsif terhadap teknologi, tetapi juga berakar pada nilai-nilai partisipasi, keadilan, dan solidaritas.

## **KESIMPULAN**

Literasi digital memegang peranan krusial dalam menguatkan kewarganegaraan aktif dan demokrasi partisipatif di platform sosial virtual di Indonesia. Media sosial telah menjadi ruang utama bagi informasi dan interaksi politik, menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan mobilisasi politik. Namun, tantangan serius seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi opini mengancam kualitas demokrasi digital.

Peningkatan literasi digital membekali warga negara dengan kemampuan kritis untuk memilah informasi, berpartisipasi secara konstruktif, dan memahami implikasi hukum dari aktivitas online. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mencegah penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian. Kewarganegaraan aktif yang didukung literasi digital akan memperkuat demokrasi partisipatif, memungkinkan masyarakat untuk secara efektif mengawal kebijakan pemerintah dan berkontribusi pada terwujudnya welfare state yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi digital di seluruh lapisan masyarakat adalah investasi penting untuk masa depan demokrasi Indonesia yang sehat dan transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Mustaqim, Dede, Fadlih Abdul Hakim, Hikmah Atfalina, and Abdul Fatakh. 2024. "Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1(1): 53–66. doi:10.56916/jmrd.viii.655.

- Asriadi, Muhammad, and Qasash Hasyim. 2024. "Pelatihan Literasi Media Sosial Bagi Pemilih Pemula Tentang Hoax, Hate Speech dan Negative Campaign." 02. Bangun, Dalam Ersada. 2020. "TRANSFORMASI PEMAHAMAN KEWARGANEGARAAN GENERASI Z DI ERA DIGITAL."
- Fatimah, Siti. 2025. "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial dan Konstitusional dalam Demokrasi Era Media Baru." *Cakrawala* 19(1): 67–86. doi:10.32781/cakrawala.v19i1.785.
- Fazira, Ahsyabila, Dasim Budimansyah, and Asep Mahpudz. 2024. "Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Society 5.0: Menerapkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara." (001).
- Hudiarini, Sri, Evi Fajriantina Lova, and Galuh Kartiko. 2024. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilu 2024."
- Jam'ul Ihsan Bambang, Nadhratun Najwa, Muhammad Risky Rahmadani, Haya Salsabil, Arie Sulistyoko, Mufti Wardani, and Ahmad Muhajir. 2025. "Kebebasan Berbicara di Media Sosial: Antara Regulasi dan Ekspresi." *Student Research Journal* 3(1): 87–96. doi:10.55606/srj-yappi.v3i1.1692.
- Lazuardy, Dimas, Annisa Sukmana, and Muhammad Japar. 2025. "Inovasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Untuk Menghadapi Tantangan Era Digital." *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta* 37(1): 35–45. doi:10.21009/parameter.37i1.03.
- Nurdiyanti, Aina. 2020. "Aktivisme Partisipasi Sosial Warga Negara Berbasis Digital." Purwanto, Susilo Adi, Riyadi Syahardani, Erwin Hermawan, and Aang Kuvaeni. 2023. "MEDIA SOSIAL: PERAN DAN KIPRAH DALAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN."
- Putra, Ferdian Ahya Al, Zia'ulhaq As Shidqi, Septyanto Galan Prakoso, and Adiba Aliyya Rahma. 2024. "COVID-19 DAN DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA." 28(1).
- Setiawan, Iman, Khaerul Syobar, and Neneng Tri Puspita. 2025. "Pendidikan Politik di Era Teknologi Digital: Peran Media Sosial dalam Menggalang Partisipasi Mahasiswa Sebagai Pemilih Pemula Pada Pemilu di Indonesia." *SELAMI IPS* 18(2): 233–47. doi:10.36709/selami.v18i2.118.
- Sihombing, Franstogu, Latifah Hannum Gultom, and Lidia Rumapea. 2021. "Kewarganegaraan Di Masyarakat Jaringan: Dampak Interaksi Online Terhadap Solidaritas Dan Kohesi Sosial."
- Syahnaz, Aniken Yustisia. 2021. "Korelasi Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna." *SPEKTRUM HUKUM* 18(1). doi:10.35973/sh.v18i1.1624.
- Widiatmaka, Pipit, and Itok Dwi Kurniawan. 2023. "Peningkatan Civic Literasi dengan Memanfaatkan Literasi Digital Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pekommas* 8(1): 59–70. doi: 10.56873/jpkm.v8i1.5126.